

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2012-2021

SKRIPSI

JHJ
Acc
17/3
Si p di yikan



Oleh:

Nama : Zahwa Awie Bima Sagala

NIM : 19313022

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2012-2021

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Zahwa Awie Bima Sagala

Nomor Mahasiswa : 19313022

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 2 Februari 2023

Peneliti



Zahwa Awie Bima Sagala

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2012-2021

Nama : Zahwa Awie Bima Sagala

NIM : 19313022

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Febuari 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Prastowo, S.E., M.Ec.Dev.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

H PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PIDRB TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

Disusun oleh : ZAHWA AWIE BIMA SAGALA

Nomor Mahasiswa : 19313022

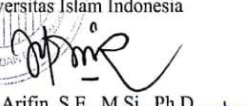
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 11 April 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prastowo, SE.,M.Ec.Dev.

Penguji : Dra. Indah Susantun, M.Si.

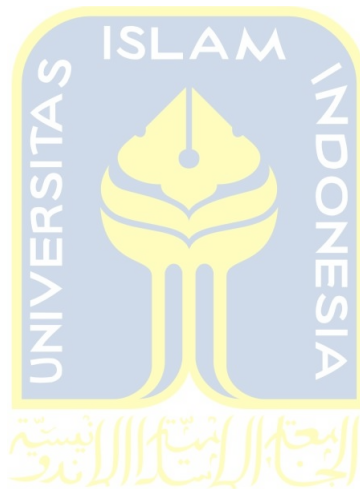


Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan kepada,
kedua orang tua saya, dan keluarga besar,
serta seluruh pihak yang selalu memberikan doa, bantuan, dukungan dan semangat.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2021”** ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Selama menempuh studi dan penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan serta semangat dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Nuryanto dan Ibu Wiwis Setiari selaku orang tua peneliti, terima kasih telah percaya dan menemani setiap langkah peneliti. Terima kasih untuk kasih sayang, doa, kerja keras, dukungan, dan nasihatnya, Papa, Mama. Semoga Papa dan Mama sehat selalu dan di lancarkan rezekinya.
2. Keluarga besar peneliti, terima kasih pakde, budhe, om dan tante, serta saudara-saudara peneliti atas doa dan dukungan yang telah diberikan
3. Bapak Prastowo, SE., M.Ec.Dev. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, nasihat dan ilmu yang telah Bapak berikan. Terima kasih untuk waktu yang selalu Bapak luangkan untuk membimbing peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Prastowo dan keluarga.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan fakultas.
6. Bapak Abdul Hakim S.E, M.Ec. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh dosen Ilmu Ekonomi.

7. Ibu Indah Susantun Dra. M.Si. selaku dosen Statistik Deskriptif yang telah membimbing saya selama 1 semester dan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya.
8. Siti Sholichah, mbak Putri dan teman-teman SMA yang tidak bisa sebutkan dari satu persatu yang telah mendorong peneliti untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk kehadiran dan memberikan keyakinan yang diberikan pada peneliti.
9. Cleaver Team dan Brother Hood (Fajrul, Aziz, Ian, Dion, Bima, Ega, Juang, Cahya, Daniel, Tya, Muli, Zidan, Arya, Septian, Yusuf) teman seperjuangan peneliti dari semester awal hingga semester akhir ini. Terima kasih untuk bareng-barengnya dalam hal apapun, dalam suka maupun duka.
10. Amanda, Nisa, Caca, Kiki, Ega, Ian, Dion, Cahya teman seperbimbingan yang telah membantu dalam mengerjakan penelitian.
11. Teman-teman Organisasi (LEM UII pada khususnya bidang sosmas, Kopma, Magang LEM UII) dan teman-teman event selama saya berkuliah disana yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan pengalaman yang membekas bagi saya
12. Serta pihak-pihak yang hadir dalam kehidupan peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa dan semangat yang diberikan kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat menerima apabila ada saran dan kritikan yang diberikan oleh pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan terutama mahasiswa, dosen, dan pemerintah dalam melihat Ekonomi Makro di Indonesia yang jarang diperhatikan.

Yogyakarta, 28 Febuari 2023

Penulis,



Zahwa Awie Bima Sagala

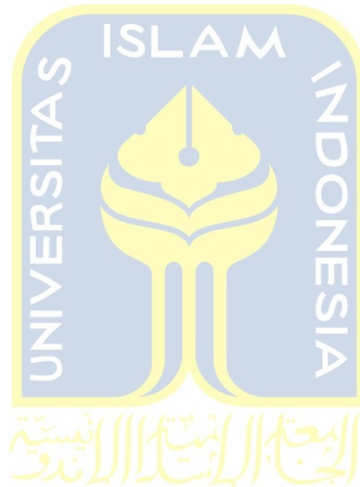
DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.2 LANDASAN TEORI	13
2.2.1 Konsep dan Teori Kemiskinan.....	13
2.3 Hubungan Antara Variabel.....	16
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	18
2.5 Hipotesis Penelitian	18
BAB III	20
METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	20
3.2 Variabel Penelitian.....	20
3.2.1 Variabel Dependen	20

3.2.2 Variabel Independen	20
3.3 Metode Analisis	22
3.3.1 Model Estimasi Regresi Data Panel	22
3.3.2 Pemilihan Model Terbaik	24
3.4 Uji Analisis Statistik	25
3.4.1 Uji Kelayakan Model atau Uji Simultan (Uji F).....	25
3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	25
3.4.3 Uji Parsial (Uji T)	25
BAB IV	27
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	27
4.2 Pemilihan model.....	28
4.2.1 Uji Chow (<i>Likelihood Ratio Tes</i>).....	28
4.2.2 Uji Hausman	29
4.3 Model Terbaik.....	30
4.4 Pengujian Hipotesis	31
4.4.1 Koefisien determinasi (R^2).....	31
4.4.2 Uji F	31
4.4.3 Uji T	31
4.5 Hasil Analisis dan Pembahasan	33
4.6 Analisis antar cross section	35
BAB V	37
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	44

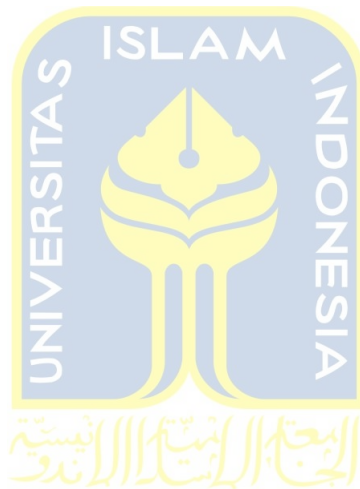
DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021(%)	2
Gambar1.2 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2012-2021(%)	3
Gambar1.3 PDRB per kapita di Pulau Jawa Tahun 2012-2021(%)	4
Gambar 1.4Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) di Jawa Tengah 2012-2021 dalam persen	5
Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2012-2021	6
Gambar 2. 1Teori setan kemiskinan (vicious circle of porverty). (Kuncoro, 1997:131)	16
Gambar 2. 2Kerangka Berpikir	18



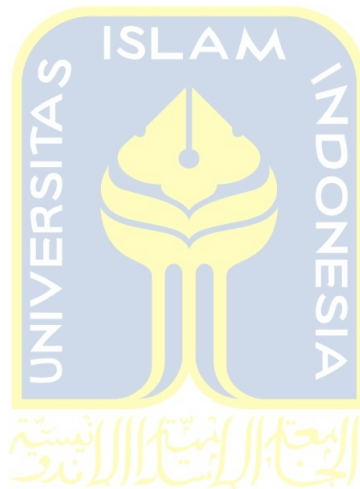
DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Deskriptif Statistik	27
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Chow Test	29
Tabel 4. 3 Hausman Test	29
Tabel 4. 4 Hasil Uji Fixed Effect Model	30
Tabel 4. 5 Ringkasan Hasil Fixed Effect Model	32
Tabel 4. 6 Hasil Intercept	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Uji CEM.....44
Lampiran II Uji FEM44
Lampiran III Uji REM45
Lampiran IV Uji Chow.....46
Lampiran V Uji Hausman46
Lampiran VI Data Penelitian47
Lampiran VII Analisis Statistik Diskriptif.....55



ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang dimana permasalahan ini juga dihadapi oleh Indonesia. Adanya kemiskinan tersebut membuat masyarakat tidak bisa membiayai kehidupan seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, menabung untuk masa depan, serta minimnya akses terhadap pelayanan publik, dan kurangnya jaminan sosial yang berakibat pada kualitas hidup yang rendah, terlebih hal ini mengakibatkan jutaan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang yang layak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder, yaitu data berasal dari web Badan Pusat Statistik (BPS) dan web resmi dari Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data panel, yang terdiri dari gabungan cross-section dengan time-series dimana data cross-section ialah 35 kabupaten/kota dan data time-series berdasarkan rentan waktu 10 tahun dari 2012-2021. Dari hasil regresi fixed effect menunjukkan PDRB dan jumlah penduduk signifikan terhadap kemiskinan sedangkan TPT dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah harus lebih diperhatikan lagi dan mengupayakan pemberantasan kemiskinan, bersama dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga sosial. Selain itu pemerintah sebaiknya memberikan dana bantuan sosial atau subsidi harus tepat sasaran yang di targetkan, jadi pemerintah perlu juga peran dari pemerintah desa beserta RW dan RT agar tepat sasaran.

Kata Kunci: PDRB, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

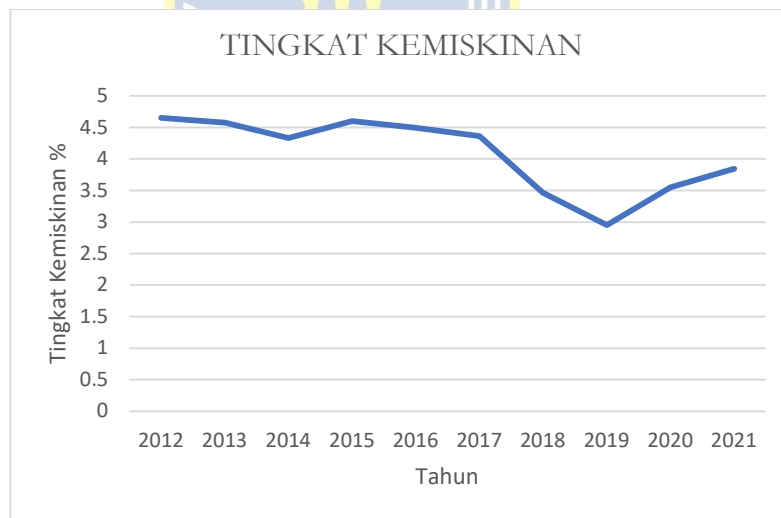
Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan dan dibutuhkan cara yang terintegrasi untuk mengatasinya. Kemiskinan adalah masalah yang ada sejak manusia ada (Gopal., 2021). Permasalahan yang dihadapi oleh semua negara yaitu kemiskinan, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang, BPS mencatat jumlah penduduk miskin berada di Pulau Jawa mencapai 13,85 juta orang atau 52% dari total penduduk di Indonesia pada tahun 2022. Pada Maret 2022 persentase penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami penurunan sebesar 9,01%, jika dibandingkan pada bulan September 2021 mencapai sekitar 9,16% (Martanti Dewi et al., 2020). Dengan adanya kemiskinan tersebut membuat masyarakat tidak bisa membiayai kehidupan, kesehatan, tidak bisa menjalankan Pendidikan, kualitas hidup yang tidak berkualitas, tidak ada tabungan untuk masa depan, minimnya akses untuk pelayanan publik, dan kurangnya jaminan sosial, lebih parahnya mengakibatkan jutaan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dan sandang yang layak (Amalia,2021).

Persoalan kemiskinan itu sangat lah kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi melainkan berhubungan dengan rendahnya tingkat Pendidikan, kesehatan dan ketidak mampunya bertahan hidup yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan dapat dicontohkan seperti kekurangan gizi, air, penurunan Kesehatan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang rendah. Jutaan anak tidak mendapatkan Pendidikan yang berkualitas yang disebabkan kemiskinan yang melanda karena sulitnya untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya (Imron et al, 2003).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makan dan dapat diukur dari sisi pengeluarannya. Penduduk digolongkan sebagai penduduk miskin bila rata-rata pengeluaran per kapitanya tiap

bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Garis Kemiskinan (GK) seperti nilai rupiah yang dikeluarkan minimum untuk diperlukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan, baik kebutuhan primer maupun sekunder (BPS, 2022).

Faktor penyebab kemiskinan terdapat pada aspek mental manusia, hal ini dikelompokkan sebagai faktor endogen penyebab kemiskinan. Nilai budaya dan sikap termasuk faktor mental yang ada dalam pola pikir tertentu pada masyarakat seperti masyarakat miskin. Pola pikir tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam sehari-hari dalam membuat keputusan yang penting (Rejekiingsih, 2022). Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diperbaiki dengan memperbaiki sikap mental masyarakat, sikap mental dapat menjadi penyebab kemiskinan pada seseorang atau kelompok masyarakat. Pembangunan di suatu negara berhasil bila dilihat dari indikator, salah satunya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan negara yang naik secara signifikan ataupun peningkatan output dalam suatu tahun tertentu.

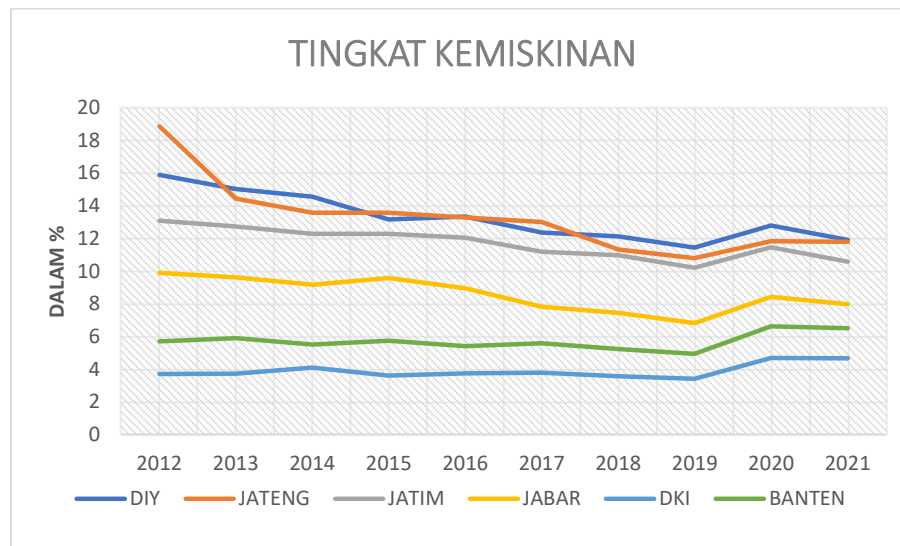


Gambar1. 1 **Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021(%)**

Sumber: BPS, diolah

Tingkat kemiskinan menurut BPS Provinsi Jawa Tengah pada periode 2012-2021 terlihat mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan 0,6% dari sebelumnya di tahun 2019 dikarenakan adanya

wabah COVID-19 yang melanda di dunia. Dengan adanya COVID-19 pertumbuhan ekonomi melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun adanya penurunan pada tahun 2017-2019 dalam waktu yang singkat Provinsi Jawa Tengah masih tinggi tingkat kemiskinannya dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa. Terlihat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 4,65% dan pada tahun 2019 turun menjadi 5.12%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 yang berada di atas.



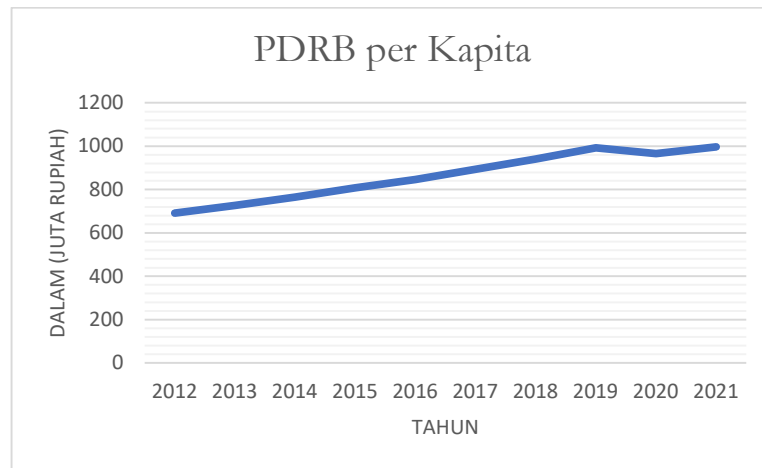
Gambar1.2 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2012-2021(%)

Sumber: BPS, diolah

Perbandingan tingkat persentase kemiskinan di pulau Jawa Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan rata-rata 12.94% dari tahun 2021-2012. Berdasarkan hasil rata-rata kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya sangat tinggi sehingga mengakibatkan tingkat masyarakat miskin di wilayah tersebut semakin banyak.

Indikator kesejahteraan penduduk di suatu daerah diukur dengan PDRB per kapita. Apabila pertumbuhan PDRB per kapita tinggi maka terdapat banyak pekerjaan yang baik sehingga menaikkan pendapatan, pemungutan pajak lebih besar

sehingga pemerintah dapat mengatasi kemiskinan di suatu daerah (Made el all, 2015). Dibawah ini terdapat tingkat PDRB selama 10 tahun dari 2012 hingga 2021 di Provinsi Jawa Tengah.



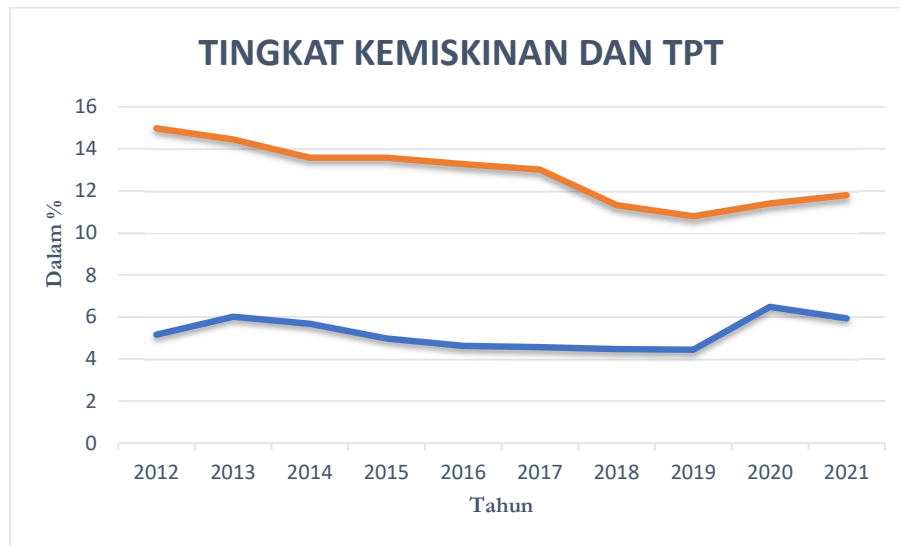
Gambar1.3 PDRB per kapita di Pulau Jawa Tahun 2012-2021(%)

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan gambar 1.3 yang menjelaskan besarnya PDRB per kapita yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam 10 tahun dari 2012 hingga 2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 26.29 juta rupiah namun pada tahun 2020 mulai naik perlahan-lahan di tahun 2021. Dalam 1 tahun mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 32.12 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah cepat dalam menaikkan PDRB perkapita.

Pengangguran bisa disebabkan adanya jumlah angkatan kerja yang lebih banyak dari pada jumlah lapangan pekerjaan yang menampung tidak sebanding. Pengangguran berdampak pada perekonomian karena produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga timbulnya masalah-masalah sosial dan munculnya kemiskinan. Dengan tidak adanya pendapatan mengakibatkan pengangguran yang berkepanjangan dan juga menimbulkan efek buruk psikologis terhadap keluarga dan mengakibatkan pengurangan dalam mengonsumsi

sandang, papan dan pangan yang akan menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan (Latifa et al., 2021). Tingkat pengangguran dapat dilihat dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja.



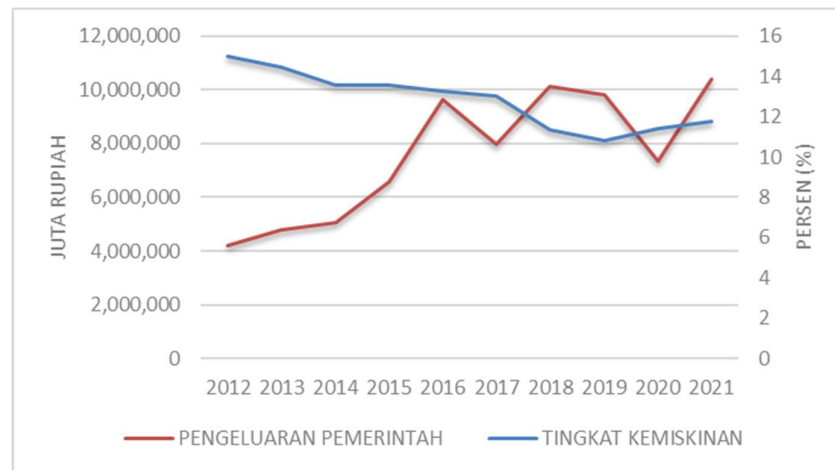
Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah 2012-2021 dalam persen

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 1.4, tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam 10 tahun dari 2012-2021 mengalami penurunan walaupun mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 2.04%. Kenaikan tersebut paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan sebelum tahun 2012-2019 mengalami penurunan, penurunan tersebut bisa mengurangi tingkat kemiskinan.

Penyebab adanya pengangguran yaitu pertumbuhan Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi pandemic COVID-19, rendahnya kualitas Angkatan kerja. Adanya perbedaan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang tidak seimbang dan motivasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang masih rendah (Aryadi & Hoesin, 2022).

Kebijakan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belanja modal adalah bentuk dari kerja nyata atas keberhasilan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat (Azahra & Lubis, 2021). Belanja modal dibagikan ke masyarakat dalam berbagai bentuk pembangunan seperti pembangunan sekolah-sekolah, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari adanya pembangunan daerah (Law, 2020). Adanya pembangunan di berbagai sektor tersebut pemerintah berharap bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2021.



Gambar 1.5 **Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2012-2021**

Sumber: DJPK.Kemenkeu dan BPS, diolah

Pada grafik diatas terlihat perkembangan pengeluaran pemerintah sejak 2012-2021 di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah tersebut ternyata masih belum bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Seperti pada gambar 1.1 bisa kita lihat tingkat kemiskinan naik drastis pada tahun 2019 hingga 2021. Dengan adanya peningkatan tersebut pemerintah belum bisa mengatasi tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini dengan mengeluarkan Sebagian besar anggarannya untuk mengatasi kemiskinan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi jumlah kemiskinan cukup tinggi diantara semua provinsi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah cenderung besar sehingga terdapat banyak masalah kemiskinan dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan bisa dikatakan belum berhasil. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji lebih lanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Jawa Tengah ini. Di sini akan membahas apa saja rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Prov. Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2012-2021?
3. Apakah pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2012-2021?
4. Apakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2012-2021?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2012-2021.
2. Untuk menganalisis pengeluaran pemerintah pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2012-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2012-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2012-2021.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat secara praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan untuk penelitian dan pembaca mengenai perkembangan dan karakteristik kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan pendapatan daerah di Jawa Tengah tahun 2012-2021 secara parsial dan simultan
3. Untuk evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Tengah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I PENDAHULUAN
Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II KAJIAN PUSTAKA
Bab II berisi pembahasan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan rumusan hipotesis.
- Bab III METODE PENELITIAN
Bab III menguraikan terkait metode penelitian yang meliputi populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis.
- Bab VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab IV menguraikan hasil penelitian beserta penjelasannya.
- Bab V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab V Kesimpulan sebagaimana yang didapatkan dari pembahasan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini terdiri atas kajian peneliti terdahulu yang di gunakan penulis sebagai tolak ukur dan bahan memperkuat hasil analisis dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah.

Menurut (Berliani, 2021) dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020, menjelaskan bahwa variabel tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk bersifat positif mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dan juga ada peneliti dari (Kiha, dkk. 2021) yang meneliti tentang Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu, menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah penduduk terhadap pengangguran tetapi signifikan antara jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang membahas tentang Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak yang diteliti oleh (Didu & Fauzi, 2016). Bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak, karena jumlah penduduk yang besar dapat memunculkan potensi besar bagi pertumbuhan pasar sehingga meningkatkan factor pertumbuhan kegiatan ekonomi. Berdasarkan sudut pandang dari sisi penawaran jumlah penduduk yang besar dengan Pendidikan dan Kesehatan yang baik dan etos kerja yang tinggi merupakan aset yang penting bagi produksi. Dari sisi lain jumlah penduduk menjadi factor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang disediakan dan banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah.

Penelitian ini menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Amalia, 2015). Berdasarkan penelitian dengan judul Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan tetapi secara tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah provinsi dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, tetapi pengeluaran pemerintah pusat langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan, tetapi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Azizah et al., (2018) penelitian ini membahas tentang Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan dengan kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini sama tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung yang ditulis oleh (Prawoto, 2017). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, penelitian ini menghasilkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) di Provinsi Lampung.

Penelitian ini ditulis oleh Bengkayang, (2017) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bengkayang menghasilkan penelitian bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkayang berdasarkan data empiris menyebutkan bahwa pola hubungan yang searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pengangguran juga menyebabkan jumlah kemiskinan meningkat. Pada Kabupaten Bengkayang secara umum tingkat pengangguran yang cenderung tinggi dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi juga. Selanjutnya penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember yang telah ditulis oleh Firdhania et al., (2018) . Penelitian ini menghasilkan bahwa jumlah penduduk, inflasi, upah minimum,

Indek Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Jember. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember, variabel tersebut cenderung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember yaitu Upah Minimum Regional (UMR).

Penelitian ini yang membahas tentang Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo yang ditulis oleh Novriansyah, (2018). Penelitian ini menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo cukup berfluktuasi dari tahun 2006 -2014, tetapi angka masih berada dibawah angka tingkat pengangguran nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran masih berada dalam kondisi yang tidak begitu parah. Tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo cukup berfluktuasi tetapi secara umum angka kemiskinan Provinsi Gorontalo berada jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional. Pengangguran dan kemiskinan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

Penelitian dari (Putra & Arka, 2016) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2012-2016 dibandingkan kesempatan kerja dan tingkat Pendidikan.

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, penelitian ini ditulis oleh (Ristika et al., 2021). Dari pembahasan tersebut memberikan informasi dari penelitian tersebut yaitu jumlah penduduk mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, kemudian hubungan negatif dan signifikan jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan disebabkan oleh penduduk di Provinsi Jawa Timur yang sebagian besar berada pada usia kerja

(*productive*) dengan tingginya tingkat produktivitas yang berpeluang meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Di Provinsi Jawa Timur angka kemiskinan tidak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana penduduk yang menganggur belum tentu miskin dan sebagian masih dibiayai.

Menurut Setya et al., (2015) yang meneliti berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2015, penelitian tersebut menjelaskan bahwa TPT positif dan signifikan terhadap kemiskinan, IPM negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan Upah Minimum positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian menurut (Latifah et al., 2017) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado. Hasil penelitian tersebut menjelaskan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Manado, Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka akan tetapi adanya hubungan negatif yang berarti semakin tinggi IPM maka Tingkat Pengangguran dapat diatasi atau dikurangi, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak ada pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Penelitian ini berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah yang ditulis oleh Lesta & Sebayang, (2013). Penelitian ini menjelaskan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah jadi indikator kemiskinan bukan disebabkan oleh tingkat pengangguran melainkan variabel lainnya.

Menurut dari peneliti dari (Rapika et al., 2020) dengan judul penelitian Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel PDRB terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008-2017 karena semakin tinggi PDRB suatu

daerah maka pembangunan daerah tersebut akan lebih baik yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena dengan tingginya PDRB suatu daerah, maka daerah tersebut dapat memperbaiki sarana dan prasarana daerahnya sehingga dapat menunjang perekonomiannya. Selain itu PDRB daerah yang tinggi juga akan membantu masyarakat yang menganggur melalui lapangan pekerjaan yang mampu diciptakan daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi daerahnya baik potensi alamnya, modal, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian dari (Cantika Roseline & Maimunah, 2022) dengan judul penelitiannya Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menjelaskan variabel PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari TPT, pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk dengan jangka waktu selama 10 tahun serta lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian sebelumnya rata-rata menggunakan sedikit variabel dan paling lama hanya 5 tahun. Data yang digunakan berupa data panel, yang terdiri dari gabungan cross-section dengan time-series dimana data cross-section ialah 35 kabupaten/kota dan data time-series berdasarkan rentan waktu 10 tahun dari 2012-2021. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian dari Roseline & Maimunah (2022), menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian dari Firdhania et al., (2018) selaras dengan penelitian saya, menjelaskan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Konsep dan Teori Kemiskinan

Menurut Nagara, (2021) kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan secara relatif sesuai dengan persepsinya, bukan hanya ketidakmampuan dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, maupun spiritual.

Menurut BPS (BPS, kemiskinan dan ketimpangan, 2021) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang dikeluarkan oleh *Worldbank*. Berdasarkan konsep diatas, kemiskinan diartikan mampu atau tidaknya berdasarkan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan bukan makan berdasarkan pengeluarannya. Penduduk dikatakan miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan lebih dilihat dari sudut pandang ekonomi. Batasan kemiskinan Ketika kondisi dimana orang tidak memiliki harta ataupun pendapatan dibawah Batasan nominal. Tingkat kemiskinan dinilai atau ditentukan berdasarkan ukuran material biasanya kondisi fisik tempat tinggal di suatu lingkungan pemukiman (Mulyadi, 2016).

Substansi kemiskinan kondisi dimana *deprivasi* kepada sumber-sumber dari pemenuhan kebutuhan dasar biasanya berupa sandang, pangan, papan dan Pendidikan dasar yang

menyampaikan bahwa konsep kemiskinan sebagai perkiraan dari hasil seberapa besar pendapatan dan kebutuhan (Nagara, 2021). Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum seseorang hidup dengan layak. Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan yang dihadapi oleh seseorang dalam menjalani kehidupan di sekitar lingkungan masyarakat normal. Kekurangan yang dialami individu yang miskin biasanya berasal dari pendapatan yang tidak mencukupi untuk membeli keperluan-keperluan asas, tahapan Pendidikan yang rendah, pendapatan harta dan aset yang tidak banyak serta masalah Kesehatan yang mengganggu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat untuk hidup dalam keadaan normal. Situasi ini sulit untuk keluar dalam garis kemiskinan bila tidak ada bantuan (Gopal et al., 2021).

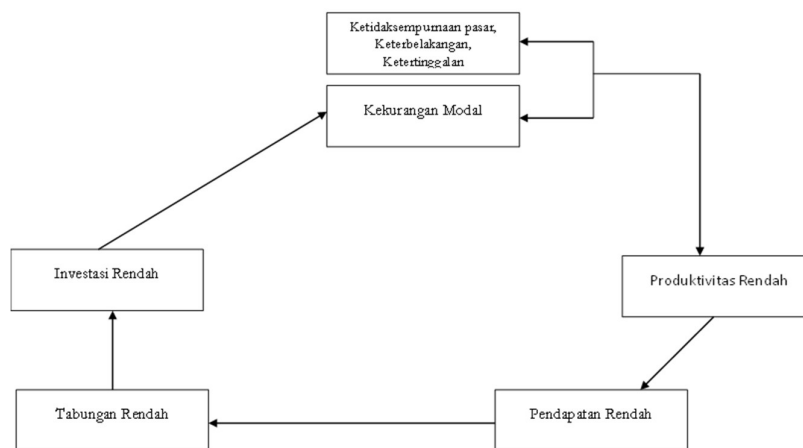
Kemiskinan merupakan konsep cair yang serba tidak ada kepastian dan sifatnya *multidimensional*. Kemiskinan bersifat cair karena bisa diartikan atau bermakna subjektif dan bisa juga dapat dimaknai objektif. Secara objektif

masyarakat tidak bisa di bilang miskin, karena pendapatan sudah di atas garis kemiskinan, beberapa ahli mengukur standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Namun, apa yang dilihat secara objektif tidak miskin itu dirasakan oleh pelaku yang merasa dia tidak mampu, karena adanya perasaan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya ataupun pelaku membandingkan dengan kondisi yang dialami oleh orang lain yang pendapatannya lebih tinggi dari pada dirinya (Imron, 2003).

Kemiskinan merupakan keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan yang minimum, khususnya konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai *cross sectors problem*, *cross areas* dan *cross generation*, dibutuhkan penanganan khusus, komprehensif dan berkelanjutan. *Political will* merupakan usaha untuk mensukseskan percepatan dalam menangani kemiskinan (Jacobus et al., 2018). Masalah kemiskinan itu sangat banyak dan bersifat multidimensional yang berhubungan dengan aspek social, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan bersifat multidimensional yang menjadi permasalahan di dunia sehingga untuk menangani memerlukan solusi yang multidimensional. Terdapat banyak program baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Kuncoro., (1997) menganalisis penyebab kemiskinan yang pertama dari sisi perekonomian yaitu secara mikro yang menjelaskan bahwa kemiskinan ada karena tidak ada kesamaan pola sumberdaya kepemilikan sehingga memunculkan ketimpangan pendapatan. Penduduk miskin itu hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dengan kualitas yang rendah. Kedua, penyebab adanya kemiskinan adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang rendah memunculkan produktivitas yang rendah dan mengakibatkan rendahnya upah dalam pekerjaan. Penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini bisa terjadi karena rendahnya pendidikan, nasib, diskriminasi, atau keturunan. Ketiga, karena adanya perbedaan dalam modal.

Dari penjelasan diatas bahwa kemiskinan dapat dihubungkan dengan teori setan kemiskinan (*vicious circle of porverty*). Rendahnya produktivitas bisa disebabkan oleh keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang mengakibatkan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan dapat berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibatkan pada keterbelakangan dan lain sebagainya. Berikut gambar dari teori setan kemiskinan.



Gambar 2. 1Teori setan kemiskinan (*vicious circle of porverty*). (Kuncoro., 1997)

2.3 Hubungan Antara Variabel

Hubungan antara variabel-variabel di atas akan di jelaskan di bagian ini sebagai berikut: Terdapat hubungan yang sangat erat sekali antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya *part-time* selalu berada di lingkungan masyarakat miskin Proboosiwi et al., (2016). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga menurunnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia (Rochaida, 2016).

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatnya kemiskinan, karena para pengangguran cenderung memiliki pendapatan yang rendah sehingga tidak tercukupinya kebutuhan hidupnya dan akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan. Selain itu juga tingginya tingkat pengangguran dapat mengakibatkan melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga

produktivitasnya rendah. Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pembangunan daerah dilakukan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pembangunan nasional ditentukan oleh pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Maka dari itu, indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin Purnama, (2017).

Hubungan antara jumlah penduduk dengan kemiskinan bila semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk semakin besar pula kebutuhan konsumsinya daripada kebutuhan investasi. Sumber daya yang ada hanya dimanfaatkan untuk pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi bukan digunakan untuk meningkatkan modal setiap tenaga kerja. Hal ini akan membuat tenaga kerja akan lambat dan pengangguran yang tinggi di sektor modern. Pertumbuhan penduduk yang cepat di suatu negara berkempang berarti tingkat pelayanan public tidak maksimal dan jumlah masyarakat miskin akan bertambah atau berkurang dalam jangka Panjang.

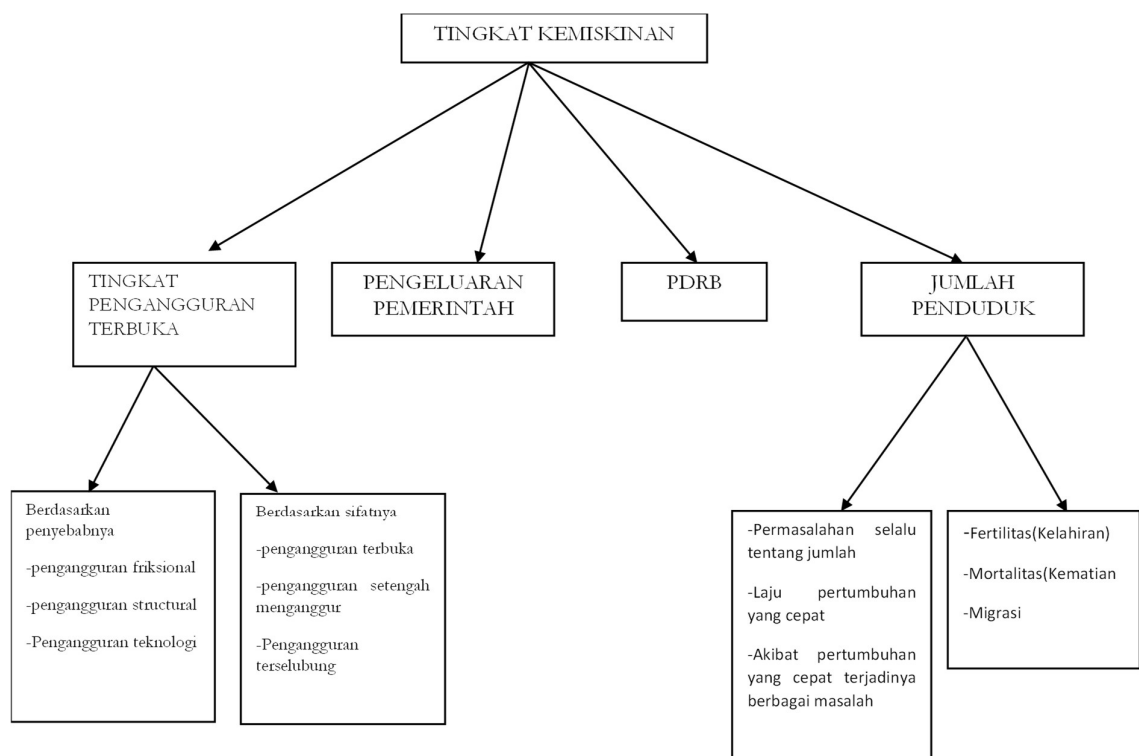
Pengeluaran pemerintah sangat berperan dalam perekonomian. Pengeluaran ini biasanya untuk menyediakan layanan public di masyarakat. Selain itu belanja pemerintah untuk menjunjung kesejahteraan masyarakat seperti tersedianya bantuan sosial. Belanja pemerintah menjadi alat fiskal untuk mempengaruhi perekonomian. Perubahan anggaran belanja dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Peningkatan belanja mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Hubungan PDRB dengan tingkat kemiskinan yaitu negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan karena adanya ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi. Dari yang menyebutkan bahwa pada awal dari proses sebuah pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat

jumlah orang miskin berkurang. PDRB ini merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa besar tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di daerah tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan rangkuman dari semua teori dasar penelitian, pada kerangka penelitian ini digambarkan dengan diagram singkat proses penelitian sebagai berikut:



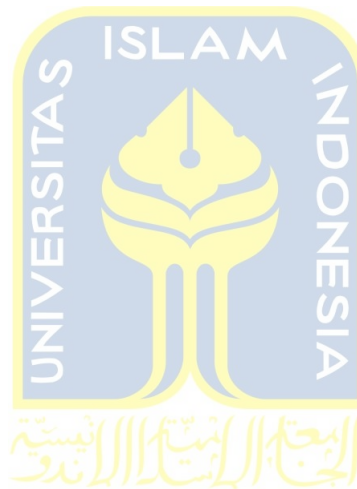
Gambar 2. 2Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau perkiraan selanjutnya yang akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2012-2021.

2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2012-2021.
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2012-2021.
4. Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2012-2021.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder, yaitu data berasal dari web Badan Pusat Statistik dan web resmi dari Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data panel, yang terdiri dari gabungan *cross-section* dengan *time-series* dimana data *cross-section* ialah 35 kabupaten/kota dan data *time-series* berdasarkan rentan waktu 10 tahun dari 2012-2021.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menerima pengaruh atau yang dijelaskan oleh variabel independen. Penelitian tersebut menggunakan data tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2021 sebagai variabel dependen.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau memberi pengaruh kepada variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini terdapat empat (4) yang terdiri dari:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2)
3. Pengeluaran Pemerintah (X3)
4. Jumlah penduduk (X4)

Tabel 3.1 **Definisi Variabel**

<i>Model</i>	<i>Macam Variabel</i>	<i>Ukuran</i>	<i>Sumber</i>
<i>P</i>	Tingkat Kemiskinan	Persentase (%)	BPS
<i>TPT</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase (%)	BPS
<i>PGLRN</i> <i>PEM</i>	Pengeluaran Pemerintah	Miliar rupiah	Kemenkeu, BPS
<i>PDRB</i>	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Juta rupiah	BPS
<i>JMLH</i> <i>Pndk</i>	Jumlah Penduduk	Juta Jiwa	BPS

Penelitian tersebut menjelaskan hubungan antara tingkat kemiskinan dengan TPT, pengeluaran pemerintah, PAD, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2021. Persamaan diestimasi menggunakan metode regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPT_{1it} + \beta_2 PGLRN Pem_{2it} + \beta_3 PDRB_{3it} + \beta_4 JMLH Pndk_{4i} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

P_{it} : Tingkat Kemiskinan (%)

β_0 : Intersep

$\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien regresi variabel independen

TPT_1 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

$PGLRN PEM_2$: Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)

$PDRB_3$: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Juta Rupiah)

$JMLH Pndk_4$: Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)

i	: 35 Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
t	: Tahun 2012-2021
ϵ	: Komponen error

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Model Estimasi Regresi Data Panel

Data longitudinal atau data panel yang terdiri dari pengamatan berulang atas objek penelitian yang sama selama rentang waktu dalam objek penelitian disebut data longitudinal. Data panel digunakan untuk menganalisis perbedaan individu, sedangkan antar individu menggunakan campuran *cross-selection* dan *time series*. Teknik analisis yang digunakan merupakan analisis regresi data panel (Azis, 2020).

Metode ini terdiri dari data *cross section* dan *time series*, dapat dikatakan sebagai model yang sederhana. Data panel lebih unggul dibandingkan cross sections ataupun *time series*, data panel menghasilkan informasi lebih banyak dan bervariasi sehingga tingkat akurasi dari estimasi yang dihasilkan lebih relevan WBBA & Pratomo, (2013).

Penelitian tersebut menerapkan tiga model pendekatan regresi data panel, terdiri dari:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Metode *Common Effect Model (CEM)* ialah metode yang paling sederhana, dimana dalam metode ini merupakan gabungan data cross section dan *time series*. Perbedaan individu dan waktu dalam perilaku yang sama tidak diperhitungkan dalam metode ini.

Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* untuk mengestimasi model data panel. Dengan metode sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y	: Variabel Dependen
α	: Intercept
X	: Variabel Independen
β	: Koefisien Regresi
ϵ	: Error
t	: Periode Waktu
i	: <i>Cross-section</i>

2. **Fixed Effect Model (FEM)**

Model ini *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan metodologi yang memprediksi bahwa kemiringan setiap individu akan sama sementara intersepnya berbeda. Variabel dummy dibutuhkan sebagai variabel tambahan yang berfungsi untuk menentukan perbedaan pada data dan periode tertentu dalam metode ini. Metode FEM digunakan dalam menentukan perilaku setiap data, meskipun terdapat kelemahan berupa berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga mengurangi keefektifan parameter. Untuk mengestimasi data panel, metode ini menggunakan metode variabel *dummy* untuk mengestimasi perbedaan intercept antara individu. Namun, *slope* yang digunakan tidak akan berbeda antar perusahaan. Metode estimasi ini disebut metode *Least Squares Dummy Variables* (LDSV) (Yuwono, 2016).

$$Y_{it} = \alpha + iaX_{it}\beta_{it} + \epsilon_{it}$$

ia : Variabel dummy

3. **Random Effect Model (REM)**

Metode FEM memiliki kelemahan sehingga terdapat metode Random Effect Model (REM) berfungsi untuk mengatasi kelemahan dengan melibatkan variabel penghalang atau *error terms*. Variable penghalang ini terdapat hubungan antar objek untuk mengatasi *heteroskedastisitas*.

$$Y_{it} = X_{it}\beta_{it} + V_{it}$$

$$\text{dinama } V_{it} = c_i + d_y + \varepsilon_{it}$$

c_i : Konstanta i

d_t : Konstanta t

3.3.2 Pemilihan Model Terbaik

Berdasarkan Latuconsina., (2018), perlu dilakukan pemilihan pendekatan regresi panel yang tepat pada data penelitian yang diperoleh. Pemilihan model panel dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Uji *Chow*

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi data panel antara model FEM atau CEM. FEM digunakan saat menolak H_0 dan sebaliknya CEM digunakan saat menerima H_0 . Kriteria yang digunakan dalam uji Chow jika nilai probabilitas uji chow < 0.10 maka menolak H_0 atau diterima H_1 , jika nilai probabilitas uji chow > 0.10 maka diterima H_0 .

2. Uji *Hausman*

Uji ini untuk mencocokkan hasil regresi dan melihat model yang tepat digunakan antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Kriteria dari uji hausman yaitu jika nilai probabilitas uji hausman < 0.10 maka menolak H_0 , jika probabilitas uji hausman > 0.10 maka diterima H_0 .

H_0 : Model *Random Effect* merupakan model terbaik

H_1 : Model *Fixed Effect* merupakan model terbaik

3. Uji *Lagrange-Multiplier* (LM)

Nilai *chi-square* dengan *degree of freedom* sejumlah variabel independent digunakan dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa REM lebih baik dari CEM. Jika model REM lebih baik maka hasilnya menolak H_0 , dan

sebaliknya jika model CEM lebih baik maka akan menerima H_0 .

3.4 Uji Analisis Statistik

Uji statistic terdapat beberapa langkah pengujian yaitu Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji T), Uji Koefisien Determinasi (R^2).

3.4.1 Uji Kelayakan Model atau Uji Simultan (Uji F)

Pengujian statistic menggunakan uji F untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan uji F, yaitu:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Jika nilai probabilitas uji F hitung < 0.10 ($\alpha=10\%$) maka akan menolak H_0 dan menerima H_1 yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika probabilitas F hitung kurang dari 0.05 maka gagal menolak H_0 dan menolak H_1 yang berarti semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

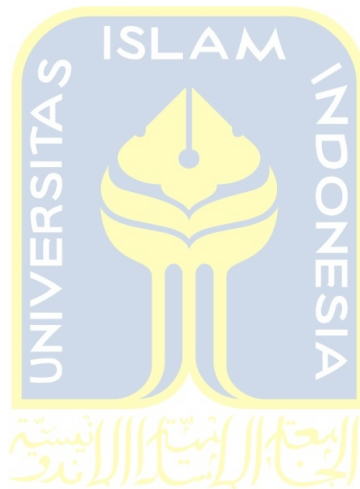
3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur pengaruh variabel dependen dalam penelitian. Saat menguji koefisien determinasi terhadap untuk angka antara nol sampai satu. Variabel independent lebih menjelaskan variabel dependen ketika nilainya mendekati angka 1. Jika nilai koefisiennya kecil atau mendekati nol, maka variabel independent tidak cukup menjelaskan variabel tersebut (Gujarati&Porter, 2012:255).

3.4.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t digunakan untuk menganalisis pengaruh satu persatu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji variabel secara parsial, dilakukan dengan membandingkan probabilitas atau dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan nilai t-tabel. Jika nilai

probabilitas t hitungnya kurang dari 0.10 maka menolak H_0 dan menerima H_a berarti variabel independen berpengaruh besar terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya t hitung lebih dari 0.10 maka menerima H_0 dan menolak H_a berarti variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati&Porter, 2012:255).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 36 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu 10 tahun 2012-2021. Data ini berasal dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenkeu.

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time-series* dan data *cross-section* yang terdiri dari beberapa objek dalam kurung waktu. Data *time series* yang digunakan dari tahun 2012 hingga 2021 dan data *cross-section* di Provinsi Jawa Tengah. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan variabel Tingkat Kemiskinan Terbuka (TPT), Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah penduduk sebagai variabel independen. Proses dalam pengelolaan data dibantu oleh program software Eviews 12. Berikut analisis statistik deskriptif yang disajikan di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 **Deskriptif Statistik**

	<i>KMSKN</i>	<i>TPT</i>	<i>PGLRN Pem</i>	<i>PDRB</i>	<i>JMLH Pndk</i>
<i>Mean</i>	12.62574	5.479377	606960.1455	20.0717	979298.0468
<i>Standar deviation</i>	4.329673	1.911267	309936.0583	16.9141	418935.4146
<i>Maximum</i>	24.21	11.98	1881757	87.36	1992685
<i>Minimum</i>	3.98	1.5	108427	9.79	118957
<i>Observasi</i>	385	385	385	385	385

Table 4.1 memperlihatkan bahwa jumlah observasi sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2021 sebanyak 385 observasi. Nilai rata-rata yang diperoleh dari variabel KMSKN sebesar 12,62574 persen selama 10 tahun dari 2012-2021, dengan nilai tertinggi 24,21 persen dan nilai terendah 3,98 persen. Nilai rata-rata dari variabel TPT 5,47 persen selama 10 tahun dari tahun 2012-2021, dengan nilai tertinggi sebesar

11,98 persen dan nilai terendah 1,5 persen. Nilai rata-rata pengeluaran pemerintah sebesar 606.960,14 juta rupiah, dengan nilai tertinggi sebanyak 1,881,757 miliar rupiah dan nilai terendah sebanyak 108,427 juta rupiah.

Nilai rata-rata variabel PDRB sebesar 20.0717 juta rupiah selama 10 tahun dari 2012 hingga 2021, dengan nilai tertinggi sebanyak 87.36 juta rupiah dan nilai terendah 9.79 juta rupiah. Nilai rata-rata variabel jumlah penduduk sebanyak 979,2 juta jiwa dalam waktu selama 10 tahun dari 2012-2021, dengan nilai tertinggi sebanyak 1,9 juta jiwa dan nilai terendah 118,9 juta jiwa.

4.2 Pemilihan model

Data analisis merupakan data panel, sehingga menggunakan metode pendekatan analisis sebagai pemilihan model terbaik. Dalam melakukan pengujian model terbaik dilakukan dengan tiga alternatif metode yaitu dengan *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Pemilihan model terbaik diantara tiga alternatif model tersebut menggunakan beberapa uji statistik untuk membandingkan model mana yang akan digunakan untuk data penelitian ini, pengujian yang dilakukan adalah Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange-Multiplier*. Sehingga akan menghasilkan pendekatan yang sesuai.

4.2.1 Uji Chow (*Likelihood Ratio Tes*)

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara CEM atau FEM. Pengambilan keputusan dengan melihat probabilitas (p) untuk Cross-Section F. jika nilai p - *value* $< 0,10$ maka model terbaik adalah FEM. Model dengan hipotesis sebagai berikut

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model}$$

Jika nilai probabilitas. $F > 0,10$ ($\alpha=10\%$), maka akan menerima H_0 menggunakan model *Common Effect*. Jika nilai probabilitas $F < 0,10$ ($\alpha=10\%$) maka menolak H_0 menggunakan model *Fixed Effect*. Berikut ini merupakan hasil dari regresi Uji Chow:

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Chow Test

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-section F</i>	9.410175	(34.311)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	247.599545	34	0.0000

Sumber: Hasil olah data *Eviews 12*

Hasil probabilitas Cross Section F $0,0000 < 0,10$ menunjukkan probabilitas 0.0000 yang kurang dari alpha (α) = 10% . Nilai *cross-section chi square* sebesar 247.599545 , maka model terbaik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *Fixed Effect Model*.

4.2.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk membandingkan untuk memilih mana model yang terbaik antara REM dan FEM. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas. Hipotesis Uji Hausman yaitu:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model}$$

Jika nilai probabilitas Chi-square $> 0,10$ ($\alpha = 10\%$) maka menerima H_0 menggunakan model Random Effect, jika nilai pro Chi-square $< 0,10$ ($\alpha = 10\%$) maka menolak H_0 menggunakan model Fixed Effect. Berikut adalah hasil regresi uji hausman

Tabel 4. 3 Hausman Test

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-section random</i>	18.581611	4	0.0009

Sumber: Hasil olah data *Eviews 12*

Tabel diatas menunjukkan nilai cross-section sebesar 18.581611 dengan prob 0.0009 lebih kecil dibandingkan alpha (α) = 10%, sehingga dapat disimpulkan menolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi model terbaik untuk uji hipotesis adalah *Fixed Effect Model*.

4.3 Model Terbaik

Tabel 4. 4 Hasil Uji *Fixed Effect Model*

<i>Variabel</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>T-Statistik</i>	<i>Prob.</i>
<i>TPT</i>	0.005419	0.126742	0.042755	0.9659
<i>PGLRN Pem</i>	-1.229306	7.253207	-1.687864	0.0924
<i>PDRB</i>	-0.131249	0.051617	-2.542759	0.0115
<i>JMLH Pndk</i>	-1.292205	3.793506	-3.408248	0.0007
<i>R-squared</i>		0.634017	<i>Adjusted R-squared</i>	0.589299
<i>F-statistik</i>		14.17807	<i>Prob(F-statistik)</i>	0.000000

Sumber: Hasil data *Eviews 12*

Setelah mendapatkan hasil *Common effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pendekatan terbaik dapat dilakukan dengan uji *Chow* untuk menemukan model terbaik antara CEM dan FEM. Selanjutnya dilakukan uji *Hausman* untuk menentukan model terbaik dari FEM dan REM. Dari hasil *Eviews 12*, uji *Chow* dan uji *Hausman* didapatkan hasil model terbaik yaitu FEM dalam mendapatkan persamaan regresi. Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect* diperoleh persamaan regresi:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 TPT_{1it} + \beta_3 PGLRN Pem_{2it} + \beta_4 PDRB_{3it} + \beta_5 JMLH Pndk_{4it} + u_{it}$$

$$Y_{it} = 29.209 + 0.003x_1 - 1.229x_2 - 0.131x_3 - 1.292x_4 + u_{it}$$

Hasil dari persamaan regresi dapat dijelaskan nilai konstanta yang diperoleh sebesar 26.56.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase pengaruh variabel TPT, pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan. Hasil estimasi Fixed Effect Model mendapatkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.634017 sehingga disimpulkan bahwa variabel TPT, pengeluaran pemerintah, PAD, jumlah penduduk dapat menjelaskan variabel tingkat kemiskinan sebesar 63% dan sisanya 37% dijelaskan oleh variabel diluar model.

4.4.2 Uji F

Penguji F ini digunakan untuk menguji seberapa besar tingkat signifikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penguji ini membandingkan F hitung dengan f tabel $=\alpha : k-1; n-k$, $\alpha = 0.05$ ($35-1= 34$; $350-35= 315$). Hasil dari perbandingan f hitung dan f tabel diperoleh f hitung sebesar 14.17807 dan f table sebesar 1,49. Jadi dari hasil perbandingan dari f hitung dan f tabel menunjukkan nilai f hitung $>$ f tabel sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara Bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel independent pada alpha 5%.

Nilai probabilitas f statistic sebesar 0.000000 sehingga dapat dibuktikan lebih kecil daripada tingkat signifikan alpha 5% ($0.000000 < 0.05$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Jadi variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel independen pada alpa 5%.

4.4.3 Uji T

Uji t statistic dapat diuji pada tingkat signifikan $\alpha=5\%$. Jika t hitung $>$ t tabel maka menolak H_0 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil Pengujian t dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan membandingkan nilai prob. dengan nilai 0,05. Kriteria pengujian t jika nilai probabilitas $<$ 0,05 maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, sebaliknya jika nilai prob. $>$ 0,05 maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.

Tabel 4. 5 Ringkasan Hasil *Fixed Effect Model*

<i>Variabel</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>T-Statistik</i>	<i>Prob.</i>	<i>Keterangan</i>
<i>TPT</i>	0.005419	0.126742	0.042755	0.9659	Tidak Signifikan
<i>PGLRN Pem</i>	-1.22E-06	7.25E-07	-1.687864	0.0924	Signifikan
<i>PDRB</i>	-0.131249	0.051617	-2.542759	0.0007	Signifikan
<i>JMLH Pndk</i>	-1.29E-05	3.79E-06	-3.408258	0.0000	Signifikan

Sumber: Hasil data *Eveiens 12*

Hasil dari regresi fixed effect menunjukkan bahwa TPT memiliki nilai T-statistik 0.04, dan nilai probabilitas sebesar 0.96. Karena nilai probabilitas $0.96 > \alpha 0.10$ maka H_0 diterima, hal ini menunjukkan bahwa TPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0.0054 hal ini menunjukkan variabel TPT meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2021 akan meningkat 0.0054 persen.

Hasil dari regresi fixed effect menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki nilai T-statistik sebesar 1.68 dan nilai probabilitas sebesar 0.09. Karena nilai probabilitas $0.09 < \alpha 0.10$ maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar -1.22 sehingga variabel pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif, yang artinya ketika pengeluaran pemerintah naik 1 miliar rupiah maka kemiskinan akan turun 1.22 persen di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2021.

Hasil dari regresi *fixed effect* dari PDRB menunjukkan bahwa nilai T-statistik 2.54, dan nilai probabilitas 0.01. Karena nilai probabilitas $0.01 < \alpha 0.10$ maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa PDRB

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar -0.13 hal ini variabel PDRB dan kemiskinan memiliki hubungan negatif, artinya ketika PDRB naik 1 juta rupiah maka kemiskinan akan turun 0.13 persen di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2021.

Hasil dari regresi *fixed effect* menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai T-statistik 3.40, dan probabilitas 0.00. Karena nilai probabilitas $0.00 < \alpha 0.10$ maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Hasil dari perhitungan regresi juga menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 1.29 hal ini menunjukkan variabel jumlah penduduk dan kemiskinan memiliki hubungan negatif, artinya ketika jumlah penduduk meningkat 1 juta jiwa maka kemiskinan akan turun 1.29 persen di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2021.

4.5 Hasil Analisis dan Pembahasan

TPT tidak berpengaruh signifikan. Artinya TPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh (Ristika et al., 2021). Dari pembahasan tersebut memberikan informasi bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena pengangguran tidak serta berpenghasilan rendah atau tidak bekerja tetapi dibiayai oleh orang yang berpenghasilan cukup sehingga dapat bertahan di atas garis kemiskinan. Pengangguran terbuka yang memiliki harta warisan atau peninggalan tidak dianggap sebagai golongan orang miskin karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan layak walaupun tidak bekerja.

Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis ini sesuai dengan Amalia et al., 2015 yang membahas variabel pengeluaran pemerintah provinsi secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat karena pengeluaran pemerintah dari provinsi tidak fokus ke penanganan kemiskinan seperti program bantuan sosial, program

jaminan kesehatan. Pengeluaran pemerintah provinsi lebih fokus ke pembiayaan infrastruktur.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang focus pada angka makro seperti tingkat inflasi yang terkendali, PDRB yang meningkat, nilai tukar mata uang yang rendah dan lainnya, sedangkan sector riil masyarakat seperti UMKM kurang berkembang yang mengakibatkan sulitnya menyerap jumlah pengangguran.

PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut menyatakan apabila PDRB mengalami peningkatan maka kemiskinan akan berkurang dan sebaliknya. Berdasarkan peneliti dari (Rapika et al., 2020) dengan judul penelitian Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan bahwa variabel PDRB terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan karena semakin tinggi PDRB suatu daerah maka pembangunan daerah tersebut akan lebih baik yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena dengan tingginya PDRB suatu daerah, maka daerah tersebut dapat memperbaiki sarana dan prasarana daerahnya sehingga dapat menunjang perekonomiannya. Selain itu PDRB daerah yang tinggi juga akan membantu masyarakat yang menganggur melalui lapangan pekerjaan yang mampu diciptakan daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi daerahnya baik potensi alamnya, modal, dan sebagainya. Pertumbuhan dan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat karena saat tahap proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan saat tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin akan berkurang (Mandey et al., 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif dalam jangka Panjang. Banyak factor yang dapat menjadikan jumlah penduduk menjadi penghalang pembangunan dan dapat berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak

diikuti oleh faktor-faktor perkembangan yang lain maka tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Sehingga, pertumbuhan jumlah penduduk sebenarnya menurunkan upah dan biaya produksi. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang terus-menerus menyebabkan peningkatan permintaan, tetapi di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang ujungnya pengurangan kemiskinan dan pembangunan lebih lanjut.

4.6 Analisis antar cross section

Berikut merupakan analisis hasil antar cross section:

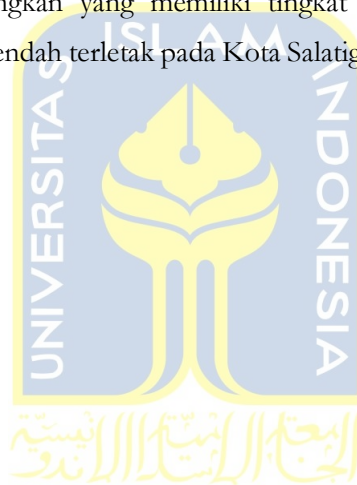
Tabel 4. 6 Hasil Intercept

Kab/Kota	Intercept	Koefisien Regresi	Nilai Konstanta
Kab. Banjarnegara	0.058311	29.26785	29.326161
Kab. Banyumas	12.12142	41.33116	53.45258
Kab. Batang	-1.701480	27.50826	25.79418
Kab. Blora	0.301965	29.511705	29.81367
Kab. Boyolali	3.060566	32.270306	35.330872
Kab. Brebes	13.03205	42.24179	55.27381
Kab. Cilacap	18.07793	47.28767	65.3656
Kab. Demak	1.208392	30.418132	31.626524
Kab. Grobogan	3.299183	32.508923	35.808106
Kab. Jepara	0.638337	29.848077	30.486414
Kab. Karanganyar	-3.638740	25.571	21.93226
Kab. Kebumen	4.721729	33.931469	38.653198
Kab. Kendal	-1.004616	28.205124	27.200508
Kab. Klaten	3.918841	33.128581	37.047422
Kab. Kudus	3.617919	32.827659	36.445578
Kab. Magelang	2.697983	31.907723	34.605706
Kab. Pati	5.693835	34.903575	40.59741
Kab. Pekalongan	-3.219689	25.990051	22.770362
Kab. Pemasang	2.228934	31.438674	33.667608
Kab. Purbalingga	-1.903815	27.305925	25.40211
Kab. Purworejo	-3.197560	26.01218	22.81462
Kab. Rembang	-5.302762	23.906978	18.604216
Kab. Semarang	-1.598769	27.610971	26.012202
Kab. Sragen	-1.002047	28.207693	27.205646
Kab. Sukoharjo	-4.153073	25.056667	20.903594
Kab. Tegal	3.193383	32.403123	35.596506
Kab. Temanggung	-1.714977	27.494763	25.779786

Kab. Wonogiri	-2.702328	26.507412	23.805084
Kab. Wonosobo	3.180241	32.389981	35.570222
Kota Magelang	-12.58967	16.62007	4.0304
Kota Pekalongan	-12.93924	16.2705	4.076576
Kota Salatiga	-15.10759	14.10215	-1.005419
Kota Semarang	8.113569	37.323309	45.436878
Kota Surakarta	-5.177098	24.032642	18.855544
Kota Tegal	-12.21114	16.9986	4.78746

Sumber: Olah data *Eviews 12*

Dari hasil nilai intercept pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas dengan nilai intercept sebesar 53.45258% merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang memiliki tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang rendah terletak pada Kota Salatiga dengan nilai intercept sebesar -1.005419%.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

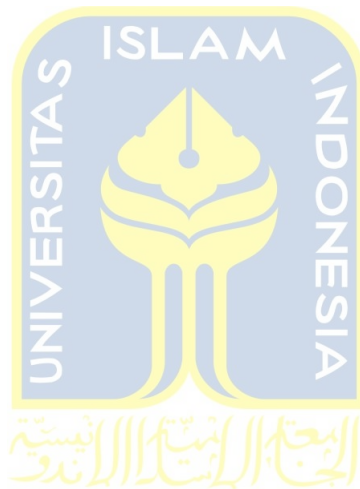
1. Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect* diperoleh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect* variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3. Hasil dari regresi *fixed effect* menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh secara signifikan dan **negatif terhadap kemiskinan**.
4. Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect* diperoleh hasil variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan **negatif dalam jangka panjang dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan**.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut merupakan kebijakan atau saran dari penulis yang dapat dilakukan dan dipertimbangkan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi tingkat kemiskinan:

1. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah bersama dinas tenaga kerja dan transmigrasi bekerja sama dengan Lembaga social untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja ataupun wirausaha terhadap masyarakat di kabupaten/kota Jawa Tengah
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan social atau subsidi yang tepat sasaran yang di targetkan dan perlunya peran dari pemerintah desa beserta RT dan RW.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebaiknya membuat kebijakan untuk memperluas lapangan pekerjaan dengan mendirikan industri baru yang bersifat padat karya dan serta meningkatkan pengembangan sektor informal seperti *home industry*. Dengan adanya lapangan pekerjaan dapat menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

4. Pengeluaran pemerintah diharapkan dapat membelanjakan alokasi keuangan dengan baik dan bisa ditargetkan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
5. Untuk mengurangi jumlah penduduk maka pemerintah mengadakan program KB sebagai gerakan nasional. Pemerintah membuat kebijakan tentang batasan umur usia nikah, dengan adanya pembatasan ini maka pertumbuhan manusia dapat di kendalikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Rahman Razak, A. (2015). The Effects of the Government Spending on the Poverty in West Sulawesi Province. In *Jurnal Analisis, Desember* (Vol. 4, Issue 2).
- Aryadi, R., & Hoesin, S. H. (2022). *5 Kewirausahaan Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Salah Ssatu Solusi Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. <https://money.kompas.com/read/202/09/29/3325026/survei-cigna-akibat-pandemi-covid-9->
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan*.
- Azis, M. I. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 122–129.
- Azizah, W. E., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.
- BPS. (2022). Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- BPS. (2021). Retrieved from kemiskinan dan ketimpangan: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 872. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>
- Besar, G., Publik, K., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Abstrak, U. (n.d.). *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Oleh : Yulianto Kadji*.
- Cantika Roseline, F., & Maimunah, E. (n.d.). *Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung*.
- Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatra Barat, P. DI, Nagara, P., & Meidona, S. (n.d.). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat*.
- Dana Desa dan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Blasius Manggu STIM Shanti Bhuana Bengkayang, A.

- (2017). *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi VOLUME 2, NO 1, 2017 DAFTAR ISI*. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE>
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak*. 6(1). http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/dokumen.tips_dasar-dasar-ekonometrika. (n.d).
- Firdhania, R., Muslihatinningsih, F., & Ekonomi, J. I. (2018). *Riza et al., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember ... Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember Factors Affecting of Unemployment Rate in Jember Regency*.
- Fitriani, M., Aula, S. & Hafidh, A., & Fikri, S. (2016). *Analisis Pengaruh Ekspore, Pembentukan Model, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Gopal, P.S., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608>
- Gujarati, (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. In *Jurnal Masyarakat dan Budaya* (Vol. 5, Issue 1).
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 3).
- Jumlah Penduduk, P., Kemiskinan, D., Khristina Kiha, E., Seran, S., & Trifonia Lau, H. (n.d.). *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 60 Emilia Khistina Kiha, Sirilius Seran & Hendriana Trifonialau*.
- kemiskinan des 2021*. (n.d).
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bali. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84.

- Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Latifa, I., Pribadi, F., & Sosiologi, J. (2021). Peran Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Mengatasi Pengangguran Di Era Digital. In *Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan* (Vol. 3).
- Latifah, N., Rotinsulu, D. C. H., Tumilaar, R. L. H., Jurusan, ^{1 2 3}, Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado Effect Of Economic Growth Aand Human Development Index On Unemployment Rate And Number Of Poor People In Manado City. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 17, Issue 02).
- Law, U. (2020). *Uniska Law Review*. 1(14), 40–60.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.202-216>
- Lesta, R. &, & Sebayang, K. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Made, I., Wirawan, T., & Arka, S. (2015). *E-Jurnal EP Unud*, 4 [5] :546-560.
- Mandey, D. R., Engka, D. S., Dj Siwu, H. F., Studi Ekonomi Pembangunan, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Dio Refelindo Mandey Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 23, Issue 1).
- Martanti Dewi, M., Magdalena, F., Pipit Ariska, N. D., Setiyawati, N., Waydewin B Rumboirusi Program Studi Kependudukan, dan C., Pascasarjana, S., Gadjah Mada, U., & Korespondensi, Y. (n.d.). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia. In *Populasi* (Vol. 28).
- Mohamad Yamin Latuconsina, Z., Perumahan, D., Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, K., & Trunojoyo Kav, J. (n.d.). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel Analysis on Factors that Influence the Human Development Index of Malang Regency based on Regional Approach and Panel Regression. *Journal of Regional and Rural Development Planning Juni*, 2017(2), 202–216.

- Mulyadi, M. (2016). *Mohammad Mulyadi Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat Government's Role In Solving Unemployment And Poverty In Society*.
- Nagara; Misharni; Syofria Meidona. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Klabat Journal of Management*, 2(2), 98–122. <http://ejournal.unklab.ac.id/index.php/kjm/article/view/592>
- Novriansyah, M. A. (2018). *Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*.
- Prawoto, A. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015). In *Journal of Economics Research and Social Sciences Sisnita* (Vol. 1, Issue 1).
- Probosiwi, R., Penelitian, J., & Sosial, K. (2016). *Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan (Unemployment and Its Influence on Poverty Level)*.
- Purnama, N. I. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara*.
- Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *EP Unud*, 7(3), 416–444.
- Rapika, O.; Damanik, K., Selna,), & Sidauruk, A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. In *JURNAL DARMA AGUNG* (Vol. 28, Issue 3).
- Rejekiningsih, T. W. (2022). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 72).
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur. In *Forum Ekonomi* (Vol. 18, Issue 1).
- Roseline, F.C., & Emi Maimunah. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Cakrawala Repositori*, 05, 12–26.

- Setya, S., Badan, N., Nasional, P., & Banyuwangi, K. (2015). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015*.
- Wahyu Azizah, E., Kusuma, H., Kunci, K., Perkapita, P., & Penduduk, J. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. In *Jurnal Ilmu Ekonomi* (Vol. 2).
- WBBA, A., & Pratomo, W. A. (n.d.). *Analisis Fundamental Dan Resiko Sistemik Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Terdaftar Pada Indeks LQ 45*.
- Yuwono, M. R. (2016). Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Geometri Berdasarkan Taksonomi Bloom dan Alternatif Pemecahannya. *Beta Jurnal Tadris Matematika*, 9(2), 111. <https://doi.org/10.20414/betajtm.v9i2.7>



LAMPIRAN

Lampiran I Uji CEM

Dependent Variable: KMSKN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/10/23 Time: 16:43
 Sample: 2012 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	-0.237959	0.112805	-2.109471	0.0356
PENG_PEM	-3.10E-06	7.61E-07	-4.075299	0.0001
PDRB	-0.082378	0.012125	-6.794028	0.0000
JMLH_PNDK	3.39E-06	5.69E-07	5.949384	0.0000
C	14.37856	0.794433	18.09915	0.0000
R-squared	0.257507	Mean dependent var	12.33329	
Adjusted R-squared	0.248898	S.D. dependent var	4.165234	
S.E. of regression	3.609847	Akaike info criterion	5.419391	
Sum squared resid	4495.694	Schwarz criterion	5.474504	
Log likelihood	-943.3934	Hannan-Quinn criter.	5.441328	
F-statistic	29.91268	Durbin-Watson stat	0.313410	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran II Uji FEM

Dependent Variable: KMSKN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/10/23 Time: 16:43
 Sample: 2012 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	0.005419	0.126742	0.042755	0.9659
PENG_PEM	-1.22E-06	7.25E-07	-1.687864	0.0924
PDRB	-0.131249	0.051617	-2.542759	0.0115
JMLH_PNDK	-1.29E-05	3.79E-06	-3.408258	0.0007
C	29.20974	3.575485	8.169448	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.634017	Mean dependent var	12.33329
Adjusted R-squared	0.589299	S.D. dependent var	4.165234
S.E. of regression	2.669330	Akaike info criterion	4.906249
Sum squared resid	2215.976	Schwarz criterion	5.336133
Log likelihood	-819.5936	Hannan-Quinn criter.	5.077358
F-statistic	14.17807	Durbin-Watson stat	0.553017
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran III Uji REM



Dependent Variable: KMSKN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/10/23 Time: 16:44
 Sample: 2012 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	-0.109907	0.116487	-0.943512	0.3461
PENG_PEM	-2.65E-06	6.11E-07	-4.345678	0.0000
PDRB	-0.102465	0.024353	-4.207440	0.0000
JMLH_PNDK	1.93E-06	1.10E-06	1.749599	0.0811
C	15.36881	1.389480	11.06084	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.512631	0.4698
Idiosyncratic random		2.669330	0.5302

Weighted Statistics			
R-squared	0.131230	Mean dependent var	3.927641
Adjusted R-squared	0.121157	S.D. dependent var	2.906939
S.E. of regression	2.725157	Sum squared resid	2562.136
F-statistic	13.02827	Durbin-Watson stat	0.509406
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.237956	Mean dependent var	12.33329
Sum squared resid	4614.075	Durbin-Watson stat	0.282867

Lampiran IV Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: FEM
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.410175	(34,311)	0.0000
Cross-section Chi-square	247.599545	34	0.0000

Lampiran V Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.581611	4	0.0009

Lampiran VI Data Penelitian

WILAYAH	TAHU N	KMSK N	TPT	Peng Pem	PDRB	JMLH Pndk
Kab. Banjarnegara	2012	18.87	3.69	364,133	11.85	883694
Kab. Banjarnegara	2013	18.71	4.16	347,719	12.41	889921
Kab. Banjarnegara	2014	17.77	4.06	249,328	12.98	895986
Kab. Banjarnegara	2015	18.37	5.05	412,390	13.6	901826
Kab. Banjarnegara	2016	14.12	3.84	956,227	14.25	907410
Kab. Banjarnegara	2017	13.94	4.72	692,309	14.97	912917
Kab. Banjarnegara	2018	11.25	3.99	719,298	15.72	918219
Kab. Banjarnegara	2019	10.73	4.44	660,141	16.6	923192
Kab. Banjarnegara	2020	11.46	5.86	899,410	14.83	1017767
Kab. Banjarnegara	2021	11.67	5.86	828,574	15.13	1026866
Kab. Banyumas	2012	19.44	5.11	674,268	16.34	1590011
Kab. Banyumas	2013	18.44	5.45	384,046	17.31	1605579
Kab. Banyumas	2014	17.45	5.37	397,405	18.12	1620918
Kab. Banyumas	2015	17.52	6.37	774,523	19.05	1635909
Kab. Banyumas	2016	17.23	4.86	1,145,815	20.02	1650625
Kab. Banyumas	2017	17.05	4.62	797,349	21.11	1665025
Kab. Banyumas	2018	13.5	4.15	1,245,047	22.28	1679124
Kab. Banyumas	2019	12.53	4.17	1,312,054	23.61	1693006
Kab. Banyumas	2020	13.26	6	1,064,312	22.07	1776918
Kab. Banyumas	2021	13.66	6.05	1,269,192	22.73	1789630
Kab. Batang	2012	13.47	5.88	311,177	14.51	722634
Kab. Batang	2013	11.96	7.02	402,056	15.22	729616
Kab. Batang	2014	11.13	7.42	309,488	15.88	736397
Kab. Batang	2015	11.27	4.56	407,509	16.59	743090
Kab. Batang	2016	18.98	5.3	791,389	17.27	749720

Kab. Batang	2017	18.8	5.82	570,777	18.08	756079
Kab. Batang	2018	15.62	4.2	592,359	18.95	762377
Kab. Batang	2019	15.03	4.11	526,729	20	768583
Kab. Batang	2020	15.9	6.92	549,835	18.79	801718
Kab. Batang	2021	16.24	6.59	586,027	19.53	807005
Kab. Blora	2012	15.1	4.75	328,820	13.23	840208
Kab. Blora	2013	14.64	6.23	443,362	13.87	844444
Kab. Blora	2014	13.66	4.3	235,543	14.41	848369
Kab. Blora	2015	13.52	4.68	418,419	15.12	852108
Kab. Blora	2016	17.46	5.15	988,943	18.6	855573
Kab. Blora	2017	17.21	2.85	684,397	19.64	858865
Kab. Blora	2018	15.46	3.3	667,787	20.42	862110
Kab. Blora	2019	14.76	3.82	691,748	21.28	865013
Kab. Blora	2020	15.64	4.89	833,329	19.78	884333
Kab. Blora	2021	16.23	3.81	759,434	20.46	886147
Kab. Boyolali	2012	13.88	4.43	422,093	16.26	945534
Kab. Boyolali	2013	13.27	5.44	626,910	17.09	951817
Kab. Boyolali	2014	12.36	4.95	512,189	17.9	957857
Kab. Boyolali	2015	12.45	2.03	539,241	18.86	963690
Kab. Boyolali	2016	19.86	3.08	765,335	19.75	969325
Kab. Boyolali	2017	19.6	3.67	803,847	20.78	974579
Kab. Boyolali	2018	17.47	2.18	744,376	21.85	979799
Kab. Boyolali	2019	16.82	3.09	904,818	23.14	984807
Kab. Boyolali	2020	17.59	5.28	767,798	21.13	1062713
Kab. Boyolali	2021	17.83	5.09	719,997	21.91	1070247
Kab. Brebes	2012	21.12	8.22	546,279	12.8	1756196
Kab. Brebes	2013	20.82	9.61	314,817	13.49	1764648
Kab. Brebes	2014	20	9.53	245,765	14.14	1773379
Kab. Brebes	2015	19.79	6.49	690,989	14.92	1781379
Kab. Brebes	2016	13.91	8.43	1,270,680	15.61	1788880
Kab. Brebes	2017	13.81	8.04	1,052,117	16.43	1796004
Kab. Brebes	2018	11.67	7.2	925,493	17.23	1802829
Kab. Brebes	2019	11.45	7.39	925,341	18.25	1809096
Kab. Brebes	2020	11.78	9.83	972,468	16.56	1978759
Kab. Brebes	2021	12.4	9.78	1,177,973	16.79	1992685
Kab. Cilacap	2012	15.92	7.29	598,580	47.83	1666163
Kab. Cilacap	2013	15.24	6.68	143,680	48.34	1676089
Kab. Cilacap	2014	14.21	5.65	234,236	49.47	1685573
Kab. Cilacap	2015	14.39	8.01	709,722	52.14	1694726
Kab. Cilacap	2016	20.53	5.75	1,439,923	54.51	1703390
Kab. Cilacap	2017	20.32	6.3	992,105	55.65	1711627
Kab. Cilacap	2018	17.58	7.49	917,486	57.05	1719504
Kab. Cilacap	2019	16.63	7.24	778,190	58.37	1727098
Kab. Cilacap	2020	17.36	9.1	813,143	46.43	1944857

Kab. Cilacap	2021	17.67	9.97	1,249,749	46.82	1963824
Kab. Demak	2012	16.73	8.4	267,780	11.85	1082472
Kab. Demak	2013	15.72	7.08	195,033	12.33	1094472
Kab. Demak	2014	14.6	5.17	237,257	12.73	1106328
Kab. Demak	2015	14.44	6.02	419,328	13.34	1117905
Kab. Demak	2016	12.67	6.06	979,849	13.88	1129298
Kab. Demak	2017	12.42	4.47	586,143	14.54	1140675
Kab. Demak	2018	11.23	7.03	602,945	15.18	1151796
Kab. Demak	2019	10.67	5.42	697,271	15.91	1162805
Kab. Demak	2020	11.27	7.31	940,613	15.3	1203956
Kab. Demak	2021	11.91	5.28	880,555	15.55	1212377
Kab. Grobogan	2012	16.13	4.2	453,225	10.42	1328197
Kab. Grobogan	2013	14.87	6.1	200,430	10.83	1336304
Kab. Grobogan	2014	13.86	4.25	258,620	11.21	1343960
Kab. Grobogan	2015	13.68	5.22	529,561	11.81	1351429
Kab. Grobogan	2016	12.09	4.59	1,133,981	12.28	1358404
Kab. Grobogan	2017	11.96	3.02	791,881	12.94	1365207
Kab. Grobogan	2018	10.04	2.22	1,037,886	13.63	1371610
Kab. Grobogan	2019	9.53	3.54	792,602	14.36	1377788
Kab. Grobogan	2020	10.18	4.5	711,538	13.36	1453526
Kab. Grobogan	2021	10.62	4.38	960,745	13.77	1460873
Kab. Jepara	2012	9.38	4.29	404,409	13.05	1135574
Kab. Jepara	2013	9.23	6.34	267,599	13.55	1153213
Kab. Jepara	2014	8.55	5.09	185,053	13.99	1170797
Kab. Jepara	2015	8.5	3.12	493,870	14.48	1188289
Kab. Jepara	2016	14.46	4.23	1,045,506	14.99	1205800
Kab. Jepara	2017	14.15	4.84	815,382	15.58	1223198
Kab. Jepara	2018	12.96	3.75	839,504	16.26	1240600
Kab. Jepara	2019	12.28	2.92	788,983	17.08	1257912
Kab. Jepara	2020	12.89	6.7	899,375	17.71	1184947
Kab. Jepara	2021	13.49	4.23	890,139	18.46	1188510
Kab.	2012	14.07	5.82	404,152	21.9	831916
Karanganyar						
Kab.	2013	13.58	3.84	234,477	22.92	840171
Karanganyar						
Kab.	2014	12.62	3.54	200,873	23.89	848255
Karanganyar						
Kab.	2015	12.46	3.6	529,344	24.86	856198
Karanganyar						
Kab.	2016	9.07	3.18	1,018,369	25.97	864021
Karanganyar						
Kab.	2017	8.75	3.17	716,192	27.23	871596
Karanganyar						
Kab.	2018	7.41	2.28	737,563	28.61	879078
Karanganyar						

Kab. Karanganyar	2019	7.14	3.12	720,536	30.14	886519
Kab. Karanganyar	2020	7.68	5.96	756,099	28.07	931963
Kab. Karanganyar	2021	8.23	5.89	780,827	28.8	938808
Kab. Kebumen	2012	22.4	3.58	513,872	11.7	1172036
Kab. Kebumen	2013	21.32	3.52	186,955	12.18	1176722
Kab. Kebumen	2014	20.5	3.25	216,019	12.84	1181006
Kab. Kebumen	2015	20.44	4.14	696,557	13.6	1184882
Kab. Kebumen	2016	13.12	2.54	1,349,023	14.24	1188603
Kab. Kebumen	2017	12.9	5.58	887,331	14.93	1192007
Kab. Kebumen	2018	10.75	5.48	786,225	15.71	1195092
Kab. Kebumen	2019	10.25	4.69	880,947	16.62	1197982
Kab. Kebumen	2020	10.86	6.07	1,060,732	14.5	1350438
Kab. Kebumen	2021	11.55	6.03	1,040,427	14.87	1361913
Kab. Kendal	2012	13.17	6.31	392,883	22.94	918763
Kab. Kendal	2013	12.68	6.43	150,810	24.15	926812
Kab. Kendal	2014	11.8	6.15	383,928	25.18	934643
Kab. Kendal	2015	11.62	7.07	453,517	26.28	942283
Kab. Kendal	2016	12.49	6.85	944,670	27.52	949682
Kab. Kendal	2017	12.28	4.93	711,293	28.89	957024
Kab. Kendal	2018	10.01	6.02	650,800	30.33	964106
Kab. Kendal	2019	9.55	6.26	735,360	31.99	971086
Kab. Kendal	2020	10.28	7.56	658,283	29.96	1018505
Kab. Kendal	2021	10.68	7.55	821,716	30.86	1025020
Kab. Klaten	2012	16.71	3.7	472,395	16.7	1143633
Kab. Klaten	2013	15.6	5.34	267,386	17.62	1148994
Kab. Klaten	2014	14.56	4.75	543,242	18.56	1154040
Kab. Klaten	2015	14.89	2.51	596,312	19.47	1158795
Kab. Klaten	2016	14.38	2.82	1,222,404	20.4	1163218
Kab. Klaten	2017	14.02	4.35	676,829	21.41	1167401
Kab. Klaten	2018	13.12	3.14	691,065	22.5	1171411
Kab. Klaten	2019	12.79	3.54	805,334	23.78	1174986
Kab. Klaten	2020	13.38	5.46	944,197	21.84	1260506
Kab. Klaten	2021	13.83	5.48	955,072	22.51	1267272
Kab. Kudus	2012	8.63	5.89	343,509	71.76	800397
Kab. Kudus	2013	8.62	8.07	296,136	73.92	810810
Kab. Kudus	2014	7.99	5.03	245,151	76.24	821136
Kab. Kudus	2015	7.73	5.04	401,223	78.23	831303
Kab. Kudus	2016	13.57	5.72	949,681	79.24	841499
Kab. Kudus	2017	13.27	3.56	681,644	80.83	851478
Kab. Kudus	2018	12.31	3.28	685,026	82.48	861430
Kab. Kudus	2019	11.77	3.8	773,755	84.46	871311

Kab. Kudus	2020	12.46	5.53	650,994	83.66	849184
Kab. Kudus	2021	12.74	3.77	736,211	81.6	852443
Kab. Magelang	2012	13.97	4.38	421,836	13.29	1209375
Kab. Magelang	2013	13.96	6.13	306,496	13.93	1221681
Kab. Magelang	2014	12.98	7.45	474,927	14.54	1233695
Kab. Magelang	2015	13.07	5.16	496,887	15.15	1245496
Kab. Magelang	2016	13.33	6.01	1,067,514	15.82	1257123
Kab. Magelang	2017	13.04	2.44	521,835	16.54	1268396
Kab. Magelang	2018	11.9	2.89	759,499	17.26	1279625
Kab. Magelang	2019	11.32	3.07	765,330	18.1	1290591
Kab. Magelang	2020	11.96	4.27	594,371	17.61	1299859
Kab. Magelang	2021	12.39	5.03	674,521	18.12	1305512
Kab. Pati	2012	13.61	11.98	447,944	17.42	1210025
Kab. Pati	2013	12.94	7.29	231,416	18.33	1218016
Kab. Pati	2014	12.06	6.37	295,543	19.06	1225594
Kab. Pati	2015	11.95	4.43	658,102	20.09	1232889
Kab. Pati	2016	18.54	6.45	1,276,083	21.07	1239989
Kab. Pati	2017	18.35	3.83	1,040,497	22.15	1246691
Kab. Pati	2018	15.41	3.57	1,013,412	23.29	1253299
Kab. Pati	2019	14.95	3.64	1,036,683	24.64	1259590
Kab. Pati	2020	15.6	4.74	1,202,837	23.09	1324188
Kab. Pati	2021	15.8	4.6	1,119,240	23.71	1330983
Kab. Pekalongan	2012	13.85	5.08	405,165	13.29	854287
Kab. Pekalongan	2013	13.51	4.78	108,427	13.98	861082
Kab. Pekalongan	2014	12.57	6.03	446,300	14.56	867573
Kab. Pekalongan	2015	12.84	5.1	545,840	15.14	873986
Kab. Pekalongan	2016	11.65	4.62	953,240	15.82	880092
Kab. Pekalongan	2017	11.38	4.39	718,302	16.56	886197
Kab. Pekalongan	2018	9.9	4.36	983,838	17.41	891892
Kab. Pekalongan	2019	9.46	4.35	786,190	18.31	897711
Kab. Pekalongan	2020	10.08	6.97	866,049	16.61	968821
Kab. Pekalongan	2021	10.21	4.28	861,070	17.01	976504
Kab. Pemasang	2012	19.27	4.85	463,374	9.79	1274475
Kab. Pemasang	2013	19.27	6.48	196,238	10.29	1279596
Kab. Pemasang	2014	18.44	7.44	325,765	10.82	1284236
Kab. Pemasang	2015	18.3	6.53	584,875	11.39	1288577
Kab. Pemasang	2016	7.65	5.51	1,122,086	11.97	1292609
Kab. Pemasang	2017	7.59	5.59	713,321	12.6	1296281
Kab. Pemasang	2018	6.98	6.17	815,009	13.28	1299724
Kab. Pemasang	2019	6.68	6.45	836,271	14.09	1302813
Kab. Pemasang	2020	7.31	7.64	894,716	12.37	1471489
Kab. Pemasang	2021	7.6	6.71	990,532	12.75	1484209
Kab. Purbalingga	2012	21.19	5.02	340,699	13.95	870276
Kab. Purbalingga	2013	20.53	5.63	156,323	14.52	879880

Kab. Purbalingga	2014	19.75	5.13	123,432	15.07	889214
Kab. Purbalingga	2015	19.7	4.84	389,759	15.73	898376
Kab. Purbalingga	2016	8.35	4.29	867,821	16.33	907507
Kab. Purbalingga	2017	8.12	5.33	483,553	17.04	916427
Kab. Purbalingga	2018	7	6.02	1,252,309	17.79	925193
Kab. Purbalingga	2019	6.66	4.73	557,165	18.71	933989
Kab. Purbalingga	2020	7.17	6.1	614,244	17.26	998561
Kab. Purbalingga	2021	7.44	6.05	699,554	17.59	1007794
Kab. Purworejo	2012	16.32	5.3	419,001	13.39	702699
Kab. Purworejo	2013	15.44	5.15	250,894	13.99	705483
Kab. Purworejo	2014	14.41	5.1	231,543	14.57	708038
Kab. Purworejo	2015	14.27	4.01	479,890	15.29	710386
Kab. Purworejo	2016	14.1	4.28	1,067,559	16.03	712686
Kab. Purworejo	2017	13.41	3.64	803,668	16.83	714574
Kab. Purworejo	2018	12.54	4.43	699,254	17.68	716477
Kab. Purworejo	2019	11.86	2.91	734,292	18.68	718316
Kab. Purworejo	2020	12.54	4.04	939,973	17.09	769880
Kab. Purworejo	2021	12.92	3.59	885,362	17.56	773588
Kab. Rembang	2012	21.88	5.75	293,855	15.37	603582
Kab. Rembang	2013	20.97	5.97	435,678	16.06	608903
Kab. Rembang	2014	19.5	5.23	343,051	16.75	614087
Kab. Rembang	2015	19.28	4.51	359,471	17.52	619173
Kab. Rembang	2016	7.99	5.21	854,345	18.3	624096
Kab. Rembang	2017	7.78	3.19	612,803	19.43	628922
Kab. Rembang	2018	7.29	2.83	659,873	20.42	633584
Kab. Rembang	2019	7.04	3.6	703,774	21.43	638188
Kab. Rembang	2020	7.51	4.83	559,931	20.8	645333
Kab. Rembang	2021	7.82	3.67	665,524	21.5	647766
Kab. Semarang	2012	9.4	4.87	372,813	25.31	960477
Kab. Semarang	2013	8.51	3.9	654,356	26.44	974092
Kab. Semarang	2014	8.05	4.38	565,654	27.61	987557
Kab. Semarang	2015	8.15	2.57	421,628	28.74	1000887
Kab. Semarang	2016	11.6	2.07	1,009,792	29.87	1014198
Kab. Semarang	2017	11.46	1.78	707,796	31.15	1027489
Kab. Semarang	2018	9.87	2.25	699,092	32.5	1040629
Kab. Semarang	2019	9.42	2.54	832,013	33.97	1053786
Kab. Semarang	2020	9.96	4.57	871,399	33	1053094
Kab. Semarang	2021	10.17	5.02	886,659	33.92	1059844
Kab. Sragen	2012	16.72	5.88	443,461	20.62	868105
Kab. Sragen	2013	15.93	5.63	456,436	21.91	871989
Kab. Sragen	2014	14.87	6.04	544,654	23.04	875600
Kab. Sragen	2015	14.86	4.51	559,894	24.33	879027
Kab. Sragen	2016	11.37	5.46	1,069,427	25.65	882090
Kab. Sragen	2017	11.1	4.55	734,454	27.09	885122

Kab. Sragen	2018	9.84	4.83	627,171	28.56	887889
Kab. Sragen	2019	9.41	3.32	633,792	30.3	890518
Kab. Sragen	2020	9.99	4.75	724,685	27.05	976951
Kab. Sragen	2021	10.24	5.02	818,963	27.81	983641
Kab. Sukoharjo	2012	10.15	5.88	456,123	21.79	841771
Kab. Sukoharjo	2013	9.87	5.63	137,349	22.84	849506
Kab. Sukoharjo	2014	9.18	6.04	245,342	23.87	856937
Kab. Sukoharjo	2015	9.26	4.51	491,837	25.01	864207
Kab. Sukoharjo	2016	11.04	5.46	988,429	26.22	871397
Kab. Sukoharjo	2017	10.8	4.55	547,445	27.51	878374
Kab. Sukoharjo	2018	8.69	4.83	597,285	28.88	885205
Kab. Sukoharjo	2019	8.35	3.39	564,027	30.51	891912
Kab. Sukoharjo	2020	9.13	6.93	668,877	29.37	907587
Kab. Sukoharjo	2021	9.68	3.32	689,335	30.31	911603
Kab. Tegal	2012	10.75	6.12	432,715	12	1409406
Kab. Tegal	2013	10.58	6.89	223,072	12.76	1415009
Kab. Tegal	2014	9.87	8.47	405,234	13.35	1420132
Kab. Tegal	2015	10.09	9.52	594,270	14.04	1424891
Kab. Tegal	2016	12.9	7.85	1,170,068	14.82	1429386
Kab. Tegal	2017	12.61	7.33	684,629	15.57	1433515
Kab. Tegal	2018	10.06	8.24	835,029	16.39	1437225
Kab. Tegal	2019	9.71	8.12	880,638	17.34	1440698
Kab. Tegal	2020	10.19	9.82	1,086,723	15.37	1596996
Kab. Tegal	2021	10.57	9.97	1,027,729	15.79	1608611
Kab.	2012	12.32	3.39	331,754	14.82	724810
Temanggung						
Kab.	2013	12.42	4.87	213,865	15.44	731911
Temanggung						
Kab.	2014	11.55	3.19	598,934	16.06	738915
Temanggung						
Kab.	2015	11.76	1.5	440,684	16.75	745825
Temanggung						
Kab.	2016	17.58	1.9	893,778	17.43	752486
Temanggung						
Kab.	2017	17.37	2.97	634,351	18.15	759128
Temanggung						
Kab.	2018	16.04	3.23	730,598	18.92	765594
Temanggung						
Kab.	2019	15.41	2.98	715,227	19.8	772018
Temanggung						
Kab.	2020	16.02	3.85	616,557	18.88	790174
Temanggung						
Kab.	2021	16.56	2.62	685,060	19.37	794403
Temanggung						
Kab. Wonogiri	2012	14.67	3.46	487,372	15.56	938641

Kab. Wonogiri	2013	14.02	3.61	268,234	16.24	942377
Kab. Wonogiri	2014	13.09	3.45	534,654	17.03	945817
Kab. Wonogiri	2015	12.98	3.07	593,165	17.89	949017
Kab. Wonogiri	2016	10.1	2.61	1,072,041	18.77	951975
Kab. Wonogiri	2017	9.9	2.38	649,472	19.71	954706
Kab. Wonogiri	2018	7.94	2.28	741,316	20.73	957106
Kab. Wonogiri	2019	7.64	2.55	774,992	21.85	959492
Kab. Wonogiri	2020	8.14	4.27	917,333	19.75	1043177
Kab. Wonogiri	2021	8.6	2.43	752,593	20.25	1049292
Kab. Wonosobo	2012	22.5	5.21	341,150	12.99	765189
Kab. Wonosobo	2013	22.08	5.82	128,412	13.43	769318
Kab. Wonosobo	2014	21.42	5.34	453,764	14	773280
Kab. Wonosobo	2015	21.45	4.47	673,254	14.58	777122
Kab. Wonosobo	2016	19.47	4.98	854,678	15.29	780793
Kab. Wonosobo	2017	19.14	4.18	582,434	15.86	784207
Kab. Wonosobo	2018	17.17	3.5	1,002,446	16.59	787384
Kab. Wonosobo	2019	16.22	3.43	656,134	17.53	790504
Kab. Wonosobo	2020	17.03	5.37	562,768	15.47	879124
Kab. Wonosobo	2021	17.43	5.26	535,324	15.86	886613
Kota Magelang	2012	10.31	8.99	203,928	37.55	119523
Kota Magelang	2013	9.8	6.75	241,174	39.67	119935
Kota Magelang	2014	9.14	7.38	204,135	41.45	120373
Kota Magelang	2015	9.05	6.43	245,193	43.44	120792
Kota Magelang	2016	8.79	5.51	446,976	45.59	121112
Kota Magelang	2017	8.75	6.68	283,537	47.92	121474
Kota Magelang	2018	7.87	4.78	295,160	50.37	121872
Kota Magelang	2019	7.46	4.37	324,544	53.23	122111
Kota Magelang	2020	7.58	8.59	285,800	51.94	121526
Kota Magelang	2021	7.75	8.73	281,343	53.56	121610
Kota Pekalongan	2012	9.47	7.67	193,013	17.89	287978
Kota Pekalongan	2013	8.26	5.28	529,180	18.76	290870
Kota Pekalongan	2014	8.02	5.42	684,435	19.59	293704
Kota Pekalongan	2015	8.09	4.1	261,060	20.39	296404
Kota Pekalongan	2016	10.88	3.85	402,238	21.28	299222
Kota Pekalongan	2017	10.65	5.05	248,967	22.22	301870
Kota Pekalongan	2018	9.08	6.08	278,340	23.28	304477
Kota Pekalongan	2019	8.7	5.8	275,535	24.48	307097
Kota Pekalongan	2020	9.03	7.02	327,042	23.92	307150
Kota Pekalongan	2021	9.4	8.73	326,746	24.66	308310
Kota Salatiga	2012	7.11	6.84	153,903	37.36	176031
Kota Salatiga	2013	6.4	6.21	129,324	39.11	178594
Kota Salatiga	2014	5.93	4.46	311,069	40.69	181193
Kota Salatiga	2015	5.8	6.43	212,129	42.21	183815
Kota Salatiga	2016	5.24	4.11	459,335	43.82	186420

Kota Salatiga	2017	5.07	3.96	250,814	45.65	188928
Kota Salatiga	2018	4.84	4.23	327,482	47.65	191571
Kota Salatiga	2019	4.76	4.33	230,893	50.03	194084
Kota Salatiga	2020	4.94	7.44	307,733	49.51	192322
Kota Salatiga	2021	5.14	7.26	347,445	50.74	193525
Kota Semarang	2012	5.13	6.01	719,271	56.47	1616596
Kota Semarang	2013	5.25	6.02	423,542	58.98	1644800
Kota Semarang	2014	5.04	7.76	417,795	61.63	1672999
Kota Semarang	2015	4.97	5.77	862,994	64.14	1701114
Kota Semarang	2016	4.85	4.59	1,721,670	66.82	1729083
Kota Semarang	2017	4.62	6.61	1,233,109	70.14	1757686
Kota Semarang	2018	4.14	5.21	1,580,937	73.49	1786114
Kota Semarang	2019	3.98	4.5	1,754,906	77.62	1814110
Kota Semarang	2020	4.34	9.57	1,507,032	83.26	1653524
Kota Semarang	2021	4.56	9.54	1,881,757	87.36	1656564
Kota Surakarta	2012	12.25	6.29	347,476	47.73	505413
Kota Surakarta	2013	11.74	7.22	532,446	50.48	507825
Kota Surakarta	2014	10.95	6.16	529,983	52.9	510077
Kota Surakarta	2015	10.89	4.53	500,619	55.55	512226
Kota Surakarta	2016	7.92	4.59	774,315	58.3	514171
Kota Surakarta	2017	7.47	4.47	546,398	61.39	516102
Kota Surakarta	2018	6.75	4.35	738,546	64.7	517887
Kota Surakarta	2019	6.6	4.16	683,707	68.55	519587
Kota Surakarta	2020	7.17	7.92	612,499	66.65	522364
Kota Surakarta	2021	7.59	7.85	362,484	69.27	522728
Kota Tegal	2012	10.04	8.75	200,424	31.52	242605
Kota Tegal	2013	8.84	9.32	353,654	33.15	243860
Kota Tegal	2014	8.54	9.2	481,321	34.66	244998
Kota Tegal	2015	8.26	8.06	293,638	36.38	246119
Kota Tegal	2016	8.2	6.67	538,603	38.21	247212
Kota Tegal	2017	8.11	8.19	338,140	40.34	248094
Kota Tegal	2018	7.81	7.81	322,341	42.55	249003
Kota Tegal	2019	7.47	8.08	353,986	45.07	249905
Kota Tegal	2020	7.8	8.4	364,472	40.08	273825
Kota Tegal	2021	8.12	8.25	362,484	40.94	275781

Lampiran VII Analisis Statistik Diskriptif

KMSK N	TPT	Peng Pem	PDRB	JMLH Pndk
-----------	-----	-------------	------	--------------

Mean	12.33329	Mean	5.309629	Mean	633372.2	Mean	26.0717429	Mean	983726.7714
Standar Error	0.22641	Standar Error	0.01795	Standar Error	16631.92	Standar Error	0.90411931	Standar Error	22499.06499
Median	12.03	Median	5.095	Median	615400.5	Median	19	Median	938724.5
Mode	11.96	Mode	6.02	Mode	362484	Mode	11.85	Mode	#N/A
Standar Deviation	4.165234	Standar Deviation	1.803791	Standar Deviation	311154.7	Standar Deviation	16.9145234	Standar Deviation	420918.9635
Sample Variance	17.34918	Sample Variance	3.253664	Sample Variance	9.68E+10	Sample Variance	286.02	Sample Variance	1.77173E+11
Kurtosis	-0.50395	Kurtosis	0.191394	Kurtosis	0.781076	Kurtosis	2.68445431	Kurtosis	-0.14510868
Skewness	0.329945	Skewness	0.570274	Skewness	0.724635	Skewness	1.83001167	Skewness	0.016022217
Range	18.52	Range	10.48	Range	1773330	Range	77.57	Range	1873162
Minimum	3.98	Minimum	1.5	Minimum	108427	Minimum	9.79	Minimum	119523
Maximum	22.5	Maximum	11.98	Maximum	1881757	Maximum	87.36	Maximum	1992685
Sum	4316.65	Sum	1858.37	Sum	2.22E+08	Sum	9125.11	Sum	344304370
Count	350	Count	350	Count	350	Count	350	Count	350